

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Istilah Business for Peace telah semakin berkembang di berbagai negara, baik sebagai strategi, manifesto, digunakan sebagai nama foundation, summit, award, dan hingga digunakan pula oleh UN Global Compact sebagai platform yang disebarluaskan dan semakin berkembang melalui Global Compact Local Network mereka yang terdapat diberbagai Negara. Berkembangnya istilah ini terjadi seiring dengan semakin berkembangnya pertumbuhan ekonomi liberal dan globalisasi di dunia saat ini. Sektor bisnis telah sering kali menjadi perdebatan apakah sektor ini menjadi sebuah keuntungan atau justru kerugian dalam konteks konflik, sebab tidak bisa dipungkiri bahwa pelaku ekonomi merupakan pemain utama dalam transformasi masyarakat. Mereka dapat terlibat secara positif maupun negatif selama masa konflik.

Terdapat berbagai system ekonomi yang telah ada di dunia hingga saat ini, seperti Laissez Faire, kapitalis, sosialis demokrat, sistem ekonomi komunis, dan sebagainya. Namun, apapun sistemnya, perusahaan dan pelaku bisnis merupakan salah satu aktor yang memainkan peran penentu, baik sebagai pemicu konflik atau justru mentransformasikannya. Hal ini karena mereka adalah salah satu aktor yang bisa menentukan dan mempengaruhi situasi sosial-ekonomi di dunia, oleh karena itu dapat dikatakan bahwa sektor bisnis bisa menjadi anugrah maupun kutukan dalam transformasi konflik.¹

Tidak dapat dipungkiri bahwa masalah ekonomi telah menjadi akar di hampir semua konflik di seluruh dunia. Berbagai konflik terjadi karena ada kepentingan bisnis di balik itu, bahkan konflik juga terjadi antara pelaku bisnis itu sendiri dengan masyarakat sekitar. Misalnya Shell di Nigeria atau DeBeers di Angola dan Liberia. Demikian pula, di Indonesia, terdapat banyak isu yang menyebabkan konflik antara pelaku bisnis dan masyarakat. Dapat kita lihat

¹ Miall, H. (2004). Conflict Transformation: A Multi-Dimensional Task. Berlin: Berghof Research. Berlin: Berghof Research.

dalam kasus AQUA dengan penduduk Klaten contohnya, atau kasus pasir besi di Kulon Progo, Yogyakarta, dan banyak lagi konflik lainnya.

Akan tetapi, di sisi lain justru sektor bisnis juga dapat berperan dalam proses perdamaian. Dalam konteks ini, ada beberapa keuntungan untuk memasukkan sektor bisnis dalam proses peacebuilding, yaitu dapat berpengaruh dalam hal kekuatan keuangan, dapat langsung menyentuh masyarakat, jaringan nasional kamar dagang dan koneksi ke otoritas politik.²

Selanjutnya, perdamaian itu sendiri juga sangat dibutuhkan oleh sektor bisnis, jadi sudah sepantasnya bila sektor bisnis juga dapat berperan dalam menciptakan perdamaian. Sebab bukan saatnya lagi untuk berfikir tentang “how to get what” tapi “what is the right thing to do in a situations and how”. Sebab situasi yang dapat kita lihat selama dekade terakhir adalah akibat dari kekuatan transformasi politik dan globalisasi ekonomi yang telah menciptakan sebuah dunia dengan peluang serta harapan baru di satu sisi, tetapi dapat meningkatkan ketidakstabilan di sisi lain.

Ketika kita memasuki abad ke-21, konflik kekerasan terus mempengaruhi kehidupan jutaan orang, merusak kemajuan manusia dan pembangunan ekonomi.³ Situasi ini juga memiliki implikasi terhadap sektor bisnis itu sendiri. Bukan hanya ekonomi yang memberikan efek transformasi dalam konflik, namun konflik juga mempengaruhi transformasi kegiatan ekonomi. Sehingga saat ini, keuntungan ekonomi bukanlah satu-satunya kepentingan bagi sektor bisnis, namun perdamaian juga menjadi kepentingan bagi mereka. Contoh sederhana dapat dilihat pada bisnis lokal. Pebisnis lokal sering kali memiliki kepentingan sendiri dalam perdamaian, karena konflik dapat mempengaruhi kelancaran bisnis mereka dan akan memakan banyak biaya, seperti biaya keamanan, biaya manajemen resiko, kerugian material, kerugian modal, biaya personil, dan lain-lain.⁴

Memang beberapa bisnis dapat berkembang dalam situasi konflik. Namun, sebagian besar bisnis yang berkembang dalam lingkungan yang damai

² Upreti, B. R., Ghimire, S., & Iff, A. (2012, July). Is Peace the Business of Business? An Exploration of Corporate Role in Conflict Transformation. Discussion Paper. South Asia Regional Coordination Office. NCCR North-South.

³ Nelson, J. (2000, January). Business of Peace: THE PRIVATE SECTOR AS A PARTNER IN CONFLICT PREVENTION AND RESOLUTION.

⁴ ibid

dan dalam ekonomi yang damai selalu melebihi jumlah bisnis yang berkembang dalam konflik atau dalam ekonomi perang. Oleh karena itu, transformasi konflik dapat menjadi pekerjaan yang mulia untuk sektor korporasi dalam mendapatkan pertumbuhan ekonomi yang merata dan pemulihan yang stabil. Sebab mulai dari perusahaan multinasional besar hingga usaha mikro memiliki peran yang penting dalam menciptakan perdamaian dan mempromosikan pembangunan sosial-ekonomi. Mereka juga memiliki peran dalam memberikan kontribusi, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan berperan dalam pencegahan dan resolusi konflik.

Oleh karena itu, agar sektor bisnis dapat memainkan peran dalam perdamaian, diperlukan suatu pendekatan. Dalam hal ini, PBB, melalui United Nation Global Compact menawarkan Business for Peace sebagai pendekatan baru untuk mencapai tujuan tersebut. Sejak diresmikan pada tahun 2013 lalu oleh Sekjen PBB, Ban Ki-Moon, Business for Peace atau yang disebut juga dengan B4P menjadi platform baru UNGC untuk terus disebarakan agar diimplementasikan di berbagai Negara, salah satunya adalah di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

1. Mengapa PBB berusaha mengimplementasikan Business for Peace (B4P) diberbagai Negara berkembang?
2. Bagaimana strategi dan pengimplementasiannya di berbagai Negara berkembang?

C. Tujuan Penulisan

Tujuan yang ingin dicapai penulis dalam tesis ini adalah untuk mengetahui:

1. Tujuan PBB berusaha mengimplementasikan platform Business for Peace (B4P) diberbagai Negara, terutama Negara berkembang.
2. Upaya dan strategi yang dilakukan PBB untuk menyebarkan dan mengimplementasikan platform ini diberbagai Negara, yang salah satunya adalah di Indonesia
3. Bagaimana pengimplementasian dan perkembangan Business for Peace hingga sekarang di Negara berkembang

4. Dampak apa yang dapat diberikan kepada pembangunan dan perdamaian

D. Literature Review

Untuk menentukan posisi sudut pandang atau perspektif dalam menganalisa masalah yang diangkat dan memetakan tulisan-tulisan yang bertema serupa dengan apa yang penulis angkat, serta untuk mengembangkan road map penelitian atau pengembangan perluasan kajian tema tersebut dengan menampilkan perspektif baru atas tema yang diangkat dalam tesis ini, maka penulis telah mereview beberapa jurnal penelitian.

Pertama adalah jurnal *Business For Peace: The New Paradigm of International Peacebuilding and Development*, oleh Jason Miklian dan Peer Schouten yang mengatakan bahwa pandangan *Business for Peace* ini dapat kita kaitkan dengan nama-nama seperti Immanuel Kant, Joseph Schumpeter, dan Francis Fukuyama, yaitu scholar yang mengkombinasikan unsur politik republik, demokrasi dan 'semangat perdagangan' dengan cara yang berbeda untuk sampai pada gagasan bahwa disposisi institusi domestik menyebabkan 'ikatan kosmopolitan' yang positif dan berkorelasi pula dengan kecenderungan kebijakan luar negeri yang damai. Ini merupakan cabang dari teori perdamaian liberal, yaitu *positive liberal peace theory* yang dalam hal ini menekankan peran lembaga liberal untuk membawa perdamaian melalui lembaga pasar. Ini menyatakan bahwa lembaga transnasional dan rezim dapat mengatasi masalah tindakan kolektif dan transaksi yang menimbulkan konflik dengan mempromosikan saling ketergantungan, dan bahwa eksternalitas potensi pasar bebas yang tak terkendali dapat dan harus diatasi dengan menanamkan mereka dalam arsitektur institusional. Teori perdamaian liberal positif langsung menginformasikan agenda yang telah mendominasi sampai timbulnya B4P.⁵ Sehingga B4P perlu digunakan sebagai paradigma dan pendekatan untuk mencapai perdamaian.

Selain itu, menurut UNGC (2005), bahwa keterlibatan sosial sektor korporasi dapat membuat sektor bisnis menjadi mitra yang potensial dalam upaya rekonstruksi pasca konflik yang dilakukan oleh pemerintah dan organisasi

⁵ Miklian, J., & Schouten, P. (2014, December 8). *Business For Peace: The New Paradigm of International Peacebuilding and Development*. PRIO/NAI Working Paper.

internasional. Hal ini juga dapat mengakibatkan keterlibatan tersebut membantu mereka mendapatkan 'izin sosial untuk beroperasi' dari para pemangku kepentingan lokal. Keterlibatan kemanusiaan ini kemudian menimbulkan rasa tanggung jawab dan rasa berterimakasih, sehingga sektor bisnis akan menjalankan perannya dalam konteks perdamaian. Hal ini dikarenakan adanya transformasi hubungan dan budaya humanisme. Bantuan kemanusiaan juga dapat memberikan keuntungan bagi sektor bisnis. Sektor korporasi dapat memberikan bantuan atau persediaan darurat lainnya kepada pemerintah dan instansi pemerintah agar dapat diberikan secara gratis ke tempat-tempat yang terkena dampak konflik. Dengan demikian, keterlibatan kemanusiaan aktor korporasi memiliki manfaat ganda untuk para aktor korporasi sendiri.⁶

Akan tetapi disisi lain menurut R. Paris bahwa “the liberal peacebuilding agenda has failed precisely in the places where it has been needed most.” Satu dekade setelah peluncuran Millenium Development Goals, inisiatif ini telah membawa keuntungan ekonomi di Negara-negara berpenghasilan rendah di mana efisiensi lembaga sudah di track yang benar, akan tetapi gagal di zona yang lebih rapuh dan terkena dampak konflik yang lebih besar. Sering kali pula liberal institutional project ini sangat ditentang oleh lokal, tidak mengatasi akar penyebab konflik, dan dapat berakhir menguntungkan hanya faksi tertentu dari masyarakat. Liberal peace theory justru berujung tidak liberal maupun menyebabkan perdamaian. Akan tetapi, akibat tidak adanya alternative, pembangunan yang berdasarkan liberal peace terus menjadi kerangka dalam aksi perdamaian kontemporer dan telah mulai diselenggarakan.⁷

Namun, menurut penelitian Swisspeace yang pada tahun 2010 lalu menerbitkan sebuah studi di Divisi Politik Keamanan Manusia mengenai peran pengusaha dalam proses mediasi.⁸ Hasil penelitian menunjukkan bahwa perusahaan swasta memiliki peran penting untuk bermain dalam proses mediasi Track 1, yang berperan dalam menyediakan sumber daya, keahlian, jaringan, dan lobi untuk mencapai perdamaian. Pada saat yang sama, penelitian ini

⁶ Upreti, B. R., Ghimire, S., & Iff, A. (2012, July). Is Peace the Business of Business? An Exploration of Corporate Role in Conflict Transformation. Discussion Paper. South Asia Regional Coordination Office. NCCR North-South.

⁷ Paris, R. (2010). Saving liberal peacebuilding. *Review of International Studies*, 36, (2): 337.

⁸ Iff, A., Alluri, R., Kohler, D., & Sguaitamatti, D. (2010). Money Makers as Peace Makers? Business Actors in Mediation Processes. *swisspeace Working Paper 2*.

menemukan bahwa pengusaha lokal memiliki potensi untuk memainkan peran yang relevan dan aktif di trek yang lebih rendah, yaitu sebagai mediator dan fasilitator.

Selain itu, dengan menghormati aturan hukum dan mematuhi tenaga kerja serta lingkungan standar internasional, perusahaan dapat juga berkontribusi terhadap perdamaian. Mars Incorporated misalnya, telah mendukung the Sustainable Tree Corps dan membantu dalam mengembangkan the Cocoa Livelihoods Program untuk mengevaluasi sektor kakao dari Ghana dan daerah lainnya. Mars bekerja untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya mengurangi pekerja anak dan melindungi pekerja di setiap tingkat rantai, dari ladang ke pabrik-pabrik. Perusahaan juga telah berkomitmen untuk sertifikasi seluruh pasokan kakao pada tahun 2020, semua 250.000 ton per tahun, sebagai berkelanjutan. Juga tentang menghormati aturan hukum, seperti korupsi yang dapat memicu ketidakstabilan dan konflik kekerasan, bisnis dengan prinsip-prinsip etika yang kuat dan kebijakan toleransi nol terhadap praktik korupsi. Sehingga menurut penelitian Swisspeace, tentu sektor bisnis dapat digunakan untuk membantu proses pembangunan dan perdamaian, hanya saja diperlukan cara, jalan, atau pendekatan yang sesuai agar sektor bisnis dapat menjalankan perannya tersebut.

E. Kerangka Pemikiran

Sebelum penulis menyusun hipotesa atau jawaban sementara atas rumusan masalah yang telah disusun sebelumnya, penulis akan menggunakan beberapa konsep ataupun teori yang akan dijadikan sebagai alat untuk menganalisa fenomena yang diangkat.

1. Konstruksi Sosial dalam Realitas Sosial

a. Konsep Realitas Sosial

Dalam Fenomenologi terdapat istilah “Lebenswelt” (*‘life-world’* atau ‘Dunia Kehidupan’) yang terdiri dari dunia atau semesta yang rumit dan lengkap, termasuk lingkungan fisik, lingkungan sosial, interaksi antar manusia (intersubyektifitas) dan nilai-nilai yang dihayati.

Lebenswelt merupakan realitas sosial sebagaimana dipahami dan dianut oleh orang-orang awam dalam kehidupannya sehari-hari.⁹

Selanjutnya Soetandyo Wignjosoebroto menyatakan bahwa “realitas” dalam artinya sebagai ‘sesuatu yang nampak’ sebenarnya adalah ‘fakta’, namun dalam maknanya yang tidak hanya sebagai sesuatu (*being*) yang disadari, diketahui, atau bahkan yang dipahami dan diyakini (*realized*) boleh dan ada di dalam alam pemikiran manusia. Maka yang namanya ‘realitas’ itu tak mesti berhenti pada konsep realitas sebagai realitas individual, melainkan realitas yang menjadi bagian dari kesadaran, pengetahuan, dan/atau keyakinan suatu kelompok sosio-kultural. Yang tersebut akhir inilah yang dalam kepustakaan ilmu-ilmu sosial disebut ‘realitas sosial’, sekalipun yang dimaksud dan ditunjuk sebagai ‘kelompok sosiokultural’ disini hanya kelompok kecil saja, malah mungkin hanya terdiri dari dua individu yang tengah berintegrasi.¹⁰

Berger juga menjelaskan bahwa realitas tercipta dalam pengalaman dan pemahaman intersubjektif antar individu secara terus menerus dalam sebuah interaksi sosial khususnya lewat media bahasa. Realitas sosial tercipta dan terpelihara dalam relasi dialektis antar individu dan dunia disekitarnya. Upaya memahami realitas dilakukan dengan melihat proses interaksi dialektis antara diri (individu) dan dunia kenyataan sosio-kulturalnya yang berlangsung terus menerus tanpa akhir tersebut. Proses dialektika ini dapat dipahami dalam tiga momen simultan, yaitu eksternalisasi, obyektivasi, dan internalisasi.¹¹

Eksternalisasi adalah usaha pencurahan diri manusia ke dalam dunia, baik dalam kegiatan mental maupun fisik. Eksternalisasi dapat kita pahami pula sebagai proses penciptaan realitas sosial oleh semua individu setelah terjadinya interaksi dengan dunia sosio-kulturalnya. Sudah merupakan hakikat manusia sendiri, dan merupakan keharusan antropologis, manusia selalu mencurahkan diri ke dalam dunia tempat ia

⁹ Wardana, Amika, Ph.D. *Fenomenologi II: Trilogi Realitas Berger-Luckmann*. Handout Kuliah 10. Teori Sosiologi Kontemporer, Universitas Negeri Yogyakarta.

¹⁰ Ngangi, C. R. (2011). *Konstruksi Sosial dalam Realitas Sosial*. AGRI-SOSIOEKONOMI, 7(2), 1-4.

¹¹ Wardana, Amika, Ph.D. *Fenomenologi II: Trilogi Realitas Berger-Luckmann*. Handout Kuliah 10. Teori Sosiologi Kontemporer, Universitas Negeri Yogyakarta.

berada.¹² Manusia tidak dapat kita mengerti apabila tidak melihat pula dunia di sekitarnya. Maka dari itu setiap individu mengalami proses sosialisasi yang berbeda-beda, sehingga memiliki pemahaman tentang masyarakat yang berbeda pula.

Objektivasi adalah hasil yang telah dicapai baik mental maupun fisik dari kegiatan eksternalisasi manusia, suatu realitas sosial yang tercipta dalam eksternalisasi secara berangsur-angsur terlembagakan dalam struktur sosial suatu masyarakat. Objektivasi masyarakat meliputi beberapa unsur misalnya institusi, peranan, identitas.¹³

Proses selanjutnya, setelah realitas sosial terlembagakan dalam struktur sosial, individu-individu memahami dan menghayatinya sebagai obyek independent. Akan tetapi, memahami dunia sosial yang sudah diobjektivasikan dan menghadapinya sebagai suatu faktivitas di luar kesadaran, belum dapat dikatakan sebagai suatu internalisasi. Proses internalisasi lebih merupakan penyerapan kembali dunia objektif ke dalam kesadaran sedemikian rupa sehingga subjektif individu dipengaruhi oleh struktur dunia sosial. Macam-macam unsur dari dunia yang diobjektivasikan akan ditangkap sebagai gejala realitas di luar kesadarannya sekaligus sebagai gejala internal bagi kesadaran. Melalui internalisasi manusia menjadi hasil masyarakat. Namun, masing-masing individu mengalami eksternalisasi yang beragam sehingga internalisasi merekapun beragam pula.

Dunia pengalaman individual tidak dipisahkan dari dunia sosial sebagaimana diutarakan oleh Berger dan Luckmann. Selanjutnya dinyatakan bahwa realitas terbentuk secara sosial, dan sosiologi ilmu pengetahuan harus menganalisa bagaimana proses itu terjadi. Keduanya mengakui adanya realitas objektif, dengan membatasi realitas sebagai kualitas yang berkaitan dengan fenomena yang dianggap berada di luar kemauan kita (sebab sesungguhnya fenomena tersebut tidak dapat dihindarkan).¹⁴

¹² Ngangi, C. R. (2011). Konstruksi Sosial dalam Realitas Sosial. *AGRI-SOSIOEKONOMI*, 7(2), 1-4.

¹³ *ibid*

¹⁴ *ibid*

Berger menegaskan pula bahwa realitas kehidupan sehari-hari memiliki dimensi-dimensi subjektif dan objektif. Manusia merupakan instrumen dalam menciptakan realitas sosial yang objektif melalui proses eksternalisasi, sebagaimana manusia mempengaruhinya melalui proses internalisasi (yang mencerminkan realitas subjektif). Melalui proses internalisasi atau sosialisasi inilah individu menjadi anggota masyarakat.

b. Konsep Konstruksi Sosial

Menurut Berger dan Luckmann, asumsi dasarnya yaitu “realitas adalah konstruksi sosial”. Selanjutnya dikatakan bahwa konstruksi sosial memiliki beberapa kekuatan. Pertama, peran sentral bahasa memberikan mekanisme konkret, dimana budaya mempengaruhi pikiran dan tingkah laku individu. Kedua, konstruksi sosial dapat mewakili kompleksitas dalam satu budaya tunggal, hal ini tidak mengasumsikan keseragaman. Ketiga, hal ini bersifat konsisten dengan masyarakat dan waktu.

Menurut DeLamater dan Hyde juga bahwa konstruksi sosial menyatakan tidak ada kenyataan pokok (essences) yang benar, realitas adalah konstruksi sosial, hasil dari suatu budaya, bahasanya, dan juga institusi-institusi. Konstruksi sosial merupakan sebuah pandangan kepada kita bahwa semua nilai, ideologi, dan institusi sosial adalah buatan manusia yang diterima umum. Konstruksi sosial adalah sebuah pernyataan keyakinan (a claim) dan juga sebuah sudut pandang (a viewpoint) bahwa kandungan dari kesadaran, dan cara berhubungan dengan orang lain itu diajarkan oleh kebudayaan dan masyarakat.¹⁵

Pemahaman individu tentang dunia, pengetahuan dan diri individu terbentuk dalam kondisi sosial historis yang konkrit. Pengetahuan dan realitas konkrit dihubungkan oleh apa yang disebut Foucault sebagai discourse atau diskursus, yakni sejumlah gagasan dan argumen yang langsung berkaitan dengan teknik-teknik control demi kekuasaan (power). Tanpa memandang dari mana kekuasaan tersebut berasal, tetapi kekuasaanlah yang mendefinisikan pengetahuan, melakukan penilaian apa yang baik dan yang buruk, yang boleh dan tidak

¹⁵ ibid

boleh, mengatur perilaku, mendisiplinkan dan mengontrol segala sesuatu, dan bahkan menghukumnya. Artinya, subyek manusia sebagai individu, juga dibentuk dan diatur oleh rejim kekuasaan. Hal ini dapat menggambarkan bagaimana konstruksi sosial dapat mempengaruhi perilaku dan orientasi sosial.

Bagi Berger, kenyataan sosial sehari-hari merupakan konstruksi sosial buatan masyarakat. Dalam perjalanan sejarahnya, dari masa silam ke masa kini, ditata dan diterima, untuk melegitimasi konstruksi sosial yang sudah ada dan memberikan makna pada berbagai bidang pengalaman individu sehari-hari. Ini menjelaskan, bahwa dunia manusia sebenarnya ditandai oleh keterbukaan, dan perilakunya hanya sedikit saja yang ditentukan oleh naluri. Ia dengan sadar membentuk perilakunya, memaksakan suatu tertib pada pengalamannya. Hal ini berlangsung secara terus-menerus, dengan kesadaran intensionalnya selalu terarah dan dipengaruhi oleh objek yang berada diluarnya, hingga relasinya dengan masyarakatnya dan segala pranatanya, bersinggungan secara dialektis.¹⁶

Berdasarkan konsep konstruksi sosial dalam realitas sosial ini, maka dapat kita simpulkan bahwa realitas sosial merupakan konstruksi sosial yang dapat tercipta karena dipengaruhi oleh bahasa, budaya, waktu, serta institusi-institusinya, yang terus terjadi berulang kali dalam masyarakat sehingga dipahami oleh individu sebagai realitas sosial. Realitas ini dapat berbeda bagi tiap individunya.

Pemahaman individu tentang dunia, pengetahuan dan diri individu terbentuk dalam kondisi sosial historis yang konkrit. Proses ini dapat berkaitan pula dengan teknik-teknik control demi kekuasaan atau power. Sehingga suatu individu serta kondisi dan hubungan sosial juga dibentuk dan diatur oleh rejim kekuasaan yang terjadi disekitarnya. Begitu pula dengan realitas sosial yang dapat kita lihat dalam hubungan antara bisnis dan masyarakat, di satu sisi dapat menimbulkan konflik, di sisi lain juga justru dapat berperan untuk menciptakan perdamaian itu sendiri. Semua ini merupakan hasil konstruksi yang terjadi antar setiap

¹⁶ ibid

individu. Hasil ini dapat berbeda-beda di berbagai lingkungan masyarakat.

Akan tetapi, apabila realitas ini merupakan hasil konstruksi dari manusia sendiri maka dapat diubah pula dengan cara mengkonstruksi kembali pemahaman setiap pelaku yang terlibat dengan memanfaatkan hal-hal yang mempengaruhi terciptanya realitas sosial tersebut, seperti budaya, rejim, kekuasaan, dan lain-lain. Maka dari itu, melalui Business for Peace yang merupakan platform dari PBB ini, diharapkan dapat mengubah realitas sosial yang umumnya terjadi antar sektor bisnis dengan masyarakat saat ini, kemudian mengkonstruksinya kembali sehingga kepentingan bisnis dengan kepentingan masyarakat dapat berjalan beriringan dan menciptakan perdamaian.

2. Positive Liberal Peace theory

Dalam *democratic peace theory* atau yang dikenal juga dengan *liberal peace theory* yang dicetuskan oleh Immanuel Kant, seorang filsuf Jerman pada tahun 1795, dengan menggunakan demokrasi dalam perspektif liberal dimana merupakan bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut percaya bahwa jika dibangunnya sistem demokrasi liberal dalam suatu negara, maka negara tersebut akan cenderung untuk menghindari perang, kecuali untuk melakukan pertahanan diri.¹⁷

Doktrin ini terkait dengan nama-nama seperti Immanuel Kant, Joseph Schumpeter, dan Francis Fukuyama, scholar yang mengkombinasikan unsur politik republik, demokrasi dan 'semangat perdagangan' dengan cara yang berbeda untuk sampai pada gagasan bahwa melalui disposisi atau penempatan setiap institusi domestik dalam suatu negara dapat menyebabkan sebuah 'ikatan kosmopolitan' yang positif dan saling berketergantungan sehingga dapat mengakibatkan kecenderungan kebijakan luar negeri yang damai. Pandangan ini menyatakan bahwa lembaga transnasional dan rezim

¹⁷ Mtholyoke, "Immanuel Kant Perpetual Peace: A Philosophical Sketch", <http://www.mtholyoke.edu/acad/intrel/kant/kant1.htm>, diakses pada 21 Mei 2016.

dapat mengatasi masalah tindakan kolektif dan transaksi yang menimbulkan konflik dengan mempromosikan saling ketergantungan, dan bahwa eksternalitas potensi pasar bebas yang tak terkendali dapat dan harus diatasi dengan menanamkan mereka dalam arsitektur institusional.

Selain itu, hubungan antar negara salah satunya didasarkan pada distribusi kepentingan yang dimiliki oleh negara. Dalam hubungan dengan negara lain, preferensi kepentingan tersebut bisa disinkronkan sehingga kerjasama bisa dilakukan. Hubungan antara satu negara dengan negara lain tidak semata-mata didasarkan pada pertimbangan yang bersifat zero-sum (menang atau kalah), namun bisa diharmonisasikan dengan saling memberi dan menerima (mengalah untuk preferensi kepentingan tertentu namun menang untuk preferensi kepentingan yang lain).¹⁸

Adanya kesamaan kepentingan tersebut memungkinkan adanya keterikatan kepentingan (*linkages*). Jaringan berbagai keterikatan kepentingan (*multiple linkages*) dalam hubungan negara-negara akan menciptakan kondisi yang oleh Keohane dan Nye, Jr. disebut sebagai interdependensi yang kompleks (*complex interdependence*). Dalam kondisi tersebut, perang akan menjadi sangat sulit dilakukan karena adanya berbagai keterikatan kepentingan yang melibatkan berbagai negara atau aktor-aktor di dalam negara. interdependensi yang kompleks tersebut bukan satu-satunya mekanisme yang memungkinkan kerja sama antar-negara bisa dilakukan. Pemetaan yang lebih detail dari paradigma Liberalisme juga menunjukkan bahwa perdamaian atau kerja sama dapat dibangun karena tiga pilar, yaitu demokrasi, perdagangan, dan institusi. Pandangan bahwa dengan memenuhi ketiga pilar tersebut agar perdamaian dapat tercapai, diperkenalkan oleh Kant dalam konsep perdamaian abadi (*perpetual peace*). Ketiga pilar tersebut, menurut Doyle tidak bisa dipahami secara terpisah dan harus dilihat dalam satu kesatuan yang utuh.¹⁹

Dalam *Three Pillars of the Liberal Peace*, Michael W. Doyle menambahkan bahwa untuk mencapai perdamaian antarnegara juga dibutuhkan tiga pilar, yaitu “*Republican representation, an ideological*

¹⁸ Wardoyo, Broto. (2015). *Perkembangan, Paradigma, dan Konsep Keamanan Internasional & Relevansinya untuk Indonesia*. Nugra Media

¹⁹ *ibid*

*commitment to fundamental human right, and transnational interdependence.*²⁰ Ketiga hal ini tidak cukup apabila dipisahkan, tetapi bila bersama-sama dapat menjadi pilar yang menghubungkan karakteristik politik dan ekonomi yang liberal dengan perdamaian liberal yang berkelanjutan.

Teori perdamaian liberal positif langsung menginformasikan agenda yang telah mendominasi dan hal ini sejalan dengan B4P.²¹ Sehingga B4P perlu digunakan sebagai paradigma dan pendekatan untuk mencapai perdamaian. Selain itu, Keyakinan bahwa kewirausahaan ekonomi akan menyebabkan perdamaian dan pembangunan dapat ditelusuri kembali ke John Locke, di mana ia berpendapat bagaimana ekspansi spasial kewirausahaan dan hak milik akan menyebabkan pemerintah sipil dengan karakteristik damai.²²

F. Hipotesa

Dari penyusunan kerangka pemikiran yang telah dijabarkan sebelumnya, maka penulis dapat menyusun hipotesa bahwa PBB berusaha mengimplementasikan Business for Peace (B4P) di berbagai negara berkembang karena platform ini penting untuk menjadi forum, guide, wadah, dan alat bagi sektor swasta untuk beroperasi secara bertanggung jawab dan diharapkan dapat secara bersama-sama dengan masyarakat, pemerintah dan stakeholder lainnya untuk menentukan dan mengambil tindakan yang tepat serta efektif untuk berperan aktif dalam mencapai perdamaian dan pembangunan yang berkelanjutan.

Tidak dapat dipungkiri, bahwa dalam era globalisasi dan maraknya pengimplementasian open market di berbagai Negara berkembang juga mengakibatkan kekhawatiran dan ketegangan dalam masyarakat terhadap sektor swasta, seperti perusahaan dan investor, terutama dari asing. Hal ini disebabkan salah satunya karena sering kali bisnis dianggap akan merugikan kepentingan publik demi kepentingan pribadi, tidak memperdulikan kepentingan umum, mengambil hak umum, hingga akhirnya menyebabkan ketegangan, bahkan

²⁰ Doyle, M. (2005). Three Pillars of the Liberal Peace. *American Political Science Review*, (3): 463-466.

²¹ Miklian, J., & Schouten, P. (2014, December 8). Business For Peace: The New Paradigm of International Peacebuilding and Development. PRIO/NAI Working Paper.

²² *ibid*

konflik. Persinggungan kepentingan antara sektor public dan swasta, masyarakat dengan pebisnis dan investor dianggap realitas sosial yang merugikan dan tidak dapat diubah.

Maka dari itulah, melalui UNGC, UN berusaha untuk merubah pandangan tersebut, sebab realitas sosial sebenarnya bersifat konstruktif, dapat dikonstruksi oleh sosial dan terjadi akibat interaksi dari pengalaman historis yang dipengaruhi oleh pemikiran dan tingkah laku individu dalam lingkungan. Sehingga realitas dalam hubungan dan tindakan sektor bisnis terhadap publik ini dapat diubah atau dikonstruksi kembali, yaitu dengan menciptakan sektor bisnis yang bertanggung jawab, tidak merugikan masyarakat, bahkan dapat bersama-sama dengan pemerintah dan masyarakat memiliki kepentingan bersama, berdialog bersama untuk menentukan solusi dari masalah yang timbul di lingkungan mereka dan mengambil langkah efektif dalam menciptakan perdamaian dan pembangunan yang berkelanjutan.

G. Metodologi Penelitian

1. Objek Penelitian

Objek yang mejadi fokus dalam penelitian ini adalah platform UN Global Compact, yaitu Business for Peace, serta berbagai Global Compact Local Networks di beberapa Negara, termasuk salah satunya di Indonesia, yaitu Indonesia Global Compact Network.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi dalam melakukan penelitian adalah kantor secretariat Indonesia Global Compact Network (IGCN) yang berada di Menara Rajawali, Jakarta.

3. Sumber Data dan Metode Pengumpulan Data

Sumber data yang digunakan oleh penulis adalah data primer dan data sekunder. Data primer, yaitu berupa hasil wawancara langsung dari subjek yang diteliti. Mengingat bahwa penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, dimana dalam menggambarkan permasalahan yang diteliti

tergantung pada validitas data informan yang memberikan informasi, maka penulis melakukan wawancara dengan subjek yang dinilai memahami permasalahan yang diangkat oleh penulis. Sehingga penulis melakukan wawancara dengan President of Indonesia Global Compact Network, bapak Y.W. Junardy, di kantor sekretariat IGCN yang bertempat di Menara Rajawali, Jakarta.

Sedangkan data sekunder yang digunakan penulis didapatkan dari data-data yang tertulis, atau yang dikenal dengan metode *library research* dimana penulis mengumpulkan data yang mendukung argument dan berhubungan dengan permasalahan yang dibahas oleh penulis dari berbagai sumber seperti buku-buku atau literature, jurnal, surat kabar, maupun data-data yang bersumber dari internet. Dalam hal ini, penulis menggunakan beberapa buku laporan tahunan dari IGCN, serta jurnal, laporan, brosur, guidelines, dan news dari UN Global Compact yang terdapat di library website UNGC.

H. Sistematika Penulisan

Dalam sistematika penulisan pada tesis ini, penulis akan membagi seluruh rangkaian penulisan kedalam 5 bab. Dimana BAB I adalah pendahuluan yang di dalamnya terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, literature review, kerangka pemikiran, hipotesa, tujuan penulisan, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II akan menjelaskan tentang UN Global Compact serta berbagai platform yang mereka miliki, termasuk salah satunya adalah Business for Peace, yaitu berupa definisi yang menjelaskan apa itu business for Peace. Kemudian latar belakang dan tujuan dari platform ini dibuat. Serta bagaimana sistem pemberlakuannya di berbagai negara.

BAB III adalah mengenai global risks yang dihadapi oleh dunia berdasarkan Global Risks Report 2016, terdiri dari resiko apa saja dan bagaimana kondisinya di beberapa wilayah atau negara.

BAB IV akan membicarakan tentang 2030 Agenda, termasuk tentang SDGs dan bagaimana solusi untuk mencapai tujuan bersama, yaitu salah satunya melalui UN Global Compact dan berbagai platform dan upayanya, termasuk

melalui Business for Peace sebagai salah satu solusi, serta bagaimana Business for Peace di beberapa Negara Berkembang, di Indonesia salah satunya dan pengaruh apa yang bisa platform ini ciptakan.

BAB V adalah kesimpulan yang dapat penulis tarik dari penelitian tesis ini.